

ABSTRACT

The thesis entitled collaborative governance of Jalin Matra - PFK in the Winongan Kidul Village of Pasuruan Regency was made because of the success of the village as a pioneer in replicating the program. This success was proven by the village of Winongan Kidul being able to reduce the number of KRTP, reduce the stunting rate, improve the economy and also the welfare of beneficiaries. The success of this Village in implementing this program is due to the collaboration among stakeholders. This collaboration is needed to carry out poverty alleviation programs because each stakeholder has different influences and interests according to the environment and the responsibility. Their involvement will provide different benefits in implementing poverty reduction policy programs. On the other hand the reason of the writer wants to raise this title because no one has ever discussed collaborative governance of Jalin Matra - PFK program especially in Pasuruan Regency.

The research method used is qualitative with descriptive approach. The data obtained in this research are primary data supported by secondary data. Primary data obtained through in-depth interviews and carried out with purposive sampling techniques then followed by snowball sampling techniques. While secondary data obtained from organizational documents both government, academics and NGO.

The results show that very dynamic level of collaboration is influenced by the roles of the nine stakeholders, they are divided into three groups namely players (stakeholders who have high interests and power), subjects (high interests but low power) and context setters (low interests but has high power). These stakeholders are both driving and determining the dynamics of the collaboration of Jalin Matra-PFK up to reach the collaboration cycle in the final stage. The weaknesses in the of this collaboration are the lack of stakeholder commitment in the context setter category and the limitations of budget and human resources. Some of the recommendations that the writer can give: best practice in local government should be given constitution; there must be special treatment between groups of beneficiaries who succeed and fail in carrying out the program, when implement poverty alleviation programs; for other regional governments that want to implement poverty alleviation feminization programs, it is better to strengthen the leadership figure, the role of NGOs and the community, use the aid model by providing the fund and apply deliberative participatory principles.

Keywords: Collaborative Governance, Feminization of Poverty, Jalin Matra - PFK, Stakeholders.

INTISARI

Tesis dengan judul *collaborative governance* pada program Jalin Matra-Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Winongan Kidul Kabupaten Pasuruan ini dibuat karena melihat keberhasilan Desa Winongan Kidul sebagai *pioneer* dalam melakukan replikasi program. Keberhasilan ini dibuktikan dengan Desa Winongan Kidul mampu menekan jumlah KRTP, mereduksi angka stunting, meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kolaborasi yang terjalin antar stakeholder. Kolaborasi antar stakeholder sangat diperlukan untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan karena setiap pemangku kepentingan yang terlibat memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda sesuai dengan lingkungan dan tanggung jawab yang dimiliki. Keterlibatan mereka akan memberi manfaat yang berbeda dalam pelaksanaan program kebijakan penanggulangan kemiskinan. Disisi lain alasan penulis ingin mengangkat judul ini karena belum pernah ada yang membahas tentang *collaborative governance* pada program Jalin Matra PFK khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memahami lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer yang kemudian didukung oleh data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara mendalam dan dilaksanakan dengan teknik *purposive sampling* serta dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen organisasi baik pemerintah, akademisi maupun NGO.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi sudah cukup dinamis dipengaruhi oleh kesembilan stakeholder yang berperan dibelakangnya, mereka terbagi kedalam tiga kelompok yaitu *players* (stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi), *subjects* (kepentingan yang tinggi tetapi kekuasaan rendah) dan *context setter* (kepentingan yang rendah tetapi memiliki kekuasaan yang tinggi). Stakeholder-stakeholder inilah yang menjadi pendorong sekaligus penentu dinamika kolaborasi Jalin Matra PFK hingga mencapai siklus kolaborasi akhir. Kelemahan dalam dinamika kolaborasi ini yaitu kurangnya komitmen stakeholder yang berada dalam kategori *context setter* dan adanya keterbatasan sumberdaya. Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah *best practice* (praktik baik) di pemerintah daerah yang terbukti membawa dampak positif dalam mencapai tujuan publik akan lebih baik jika ada payung hukum nasional; dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan harus ada perlakuan khusus antara kelompok penerima bantuan yang berhasil dan gagal dalam menjalankan program, sehingga ada perbaikan untuk kedepannya; untuk pemerintah daerah lain yang ingin menerapkan program pengentasan feminisasi kemiskinan alangkah lebih baik jika memperkuat sosok kepemimpinan, peran NGO dan masyarakat, menggunakan model bantuan dengan memberi modal usaha dan mengedepankan prinsip partisipatoris deliberatif.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Feminisasi Kemiskinan, Jalin Matra PFK, Stakeholder.